

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

- Ansyah MK, 2010, *Hukum Perkawinan di Indonesia : Masalah – Masalah Krusial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Anwar Rachman, Pwaitra Thalib, dan Saepudin Muhtar, 2020. *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*, Jakarta : Prenadamedia Group.
- Atmosudirjo, S. Prajudi, 1994, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Ghalian.
- Basah, Sjachran, 1992, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap-Tindak Administrasi Negara*, Bandung : Alumni Press.
- Berge J.B.J.M ten dan Spelt N.M, 2014, *Hukum Administrasi Negara disunting oleh Ridwan H.R.*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Cahyani, Tinuk Dwi, 2020, *Hukum Perkawinan*, Malang : Universitas Muhammadiyah.
- Darmabrata, Wahyono, 2009, *Hukum Perkawinan Perdata (Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Harta Benda Perkawinan)*, Jakarta : Rizkita.
- Devrizo, 2008. *Kinerja pelayanan publik dalam penerbitan KK dan KTP Siak Online*, Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.
- Elfirda Ade Putri, 2021. *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, Purwokerto : CV Pena Persada, Purwokerto.
- Elidar Sari, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Lhokseumawe : CV BieNa Edukasi.
- Gede, I Nyoman, 2017. *Hukum Administrasi Negara*, Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
- H.F.A. Vollmar, 1996, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu.
- Haniatjo, Ronny, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta : PT. Ghalia Indonesia.
- Hilman Hadikusima, 2020. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung : CV Mandur Maju.
- Idris, Mohd, 1996. *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis dari Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum, Islam*, Jakarta : BumiAksara.

- Idris, Mohd, 2006. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, 2016, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Jakarta : Unimal Press.
- Kusumo, Sudikno Merto, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty.
- M. Jafar, *Analisis Pencatatan Sipil Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Perdata*, Banda Aceh : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.
- M. Syamsudin, 2008. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajagrafindo.
- Manan, Abdul, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana.
- Minollah dan Eko Purnomo, Crisdianto, 2006, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta : Mataram University Press.
- Moch. Isnaeni, 2016, *Pijar Pendar Hukum Perdata*, Surabaya : Revka Petra Media.
- Muchsan, 2022, *Hukum Administrasi Negara*, Depok : RajaGrafindo Persada.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB : Mataram University Press.
- Nazarudin, Mustika, dan Mihradi, 2021, *Hukum Administrasi Negara*, Bogor : LPPM Universitas Pakuan.
- Pasek, I Made, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta : Prenada Media Group.
- Philipus M., 2011, Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Prayudi, Rian, 2022. *Hukum Perkawinan Adat*, Riau : Fakultas Hukum Universitas Tuanku Tambusai.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1966. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung : Sumur.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Ridwan, 2011. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- S.F. Marbun, 2001, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta : FH UII Press.
- Sabiq, Sayyid, 2013. *Fikih Sunnah Jilid 3*, Jakarta : Tinta Abdi Gemilang.
- Saleh, K. Wantjik, 2012, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta : Kencana PernadaMedia Group.

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2009. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soemiyati, 1986. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang – Undang Perkawinan (Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Yogyakarta : Pradya Pramitta.
- Sudrajat, Tedi dan Endra Wijaya, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Sulistiani, Siska Lis, 2015, *Kedudukan Hukum Anak: Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Bandung : Refika Aditama.
- Syakit, Muhammad Fu'ad, 2002, *Perkawinan Terlarang*, Jakarta : CV. Cendekia Sentra Muslim.
- Tjandra, Riawan, 2021, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Tobing, G.H.S Lumban, 1992, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta : Erlangga.
- Winarno, 2017, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi Edisi Ke 3*, Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Yulia, 2015. *Hukum Perdata*, Aceh, CV Biena Edukasi.

Peraturan Perundang – Undangan

- Undang – Undang Dasar RI Tahun 1945.
- Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019).
- Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634).
- Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475).
- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Pramita, 2009.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Pedoman Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal.

Penetapan Pengadilan Negeri Tondano Nomor : 492/Pdt.P/2023/PN.Tnn.

Jurnal Ilmiah

Abdul, Ali, “Kedudukan Hukum Administrasi Negara Dalam Tata Hukum Indonesia”, *Jurnal Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung*, hlm. 1-13.

Anam, Khoirul, “Studi Makna Perkawinan Dalam Perspektif Hukum di Indonesia (Komparasi Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHP) Dengan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Yustitiabelen*, Vol. 5, No. 1, 2019, hlm.1-12.

Aprilio, Neneng, dan Yayuk, “Kesadaran Hukum Status Hukum Perkawinan Dalam Kaitannya Dengan Hak Dan Kewajiban Warga Negara”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2023, hlm. 1-9.

Artayassa, I Nyoman, “Kedudukan Hukum Administrasi Negara Dalam Ilmu Hukum”, *Jurnal Carawati*, Vol. 2, No.1, 2019, hlm. 1-11.

- Aziz, Hasnah, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Memperoleh Akta Kelahiran Berdasarkan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak”, *Jurnal Lex Jurnalica*, Vol. 15, No. 1, 2018, hlm.1-15.
- Basuki, Agung, “Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat”, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 1-15.
- Dessy, Gofar, dan Hamid, “Prosedur Pencatatan Anak Luar Kawin Di Catatan Sipil”, *Jurnal Ilmiah Kenotariatan*, Vol. 8, No.1, 2019, hlm. 1-10.
- Dewi, Mas Adi Trinaya, “Kepastian Hukum Kartu Tanda Penduduk Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan”, *Jurnal Nasional Inobali*, 2019, hlm. 1-8.
- Dewi, Putu Eka Trisna, “Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Yang Dilaksanakan Di Luar Negeri”, *Jurnal Yustitia*, Vol. 14, No. 2, 2020, hlm. 1-21.
- Dotulong, Sergio, “Analisis Yuridis Keputusan Tata Usaha Negara Yang Dikeluarkan Tanpa Wewenang Sebagai Objek Gugatan Di Pengadilan Tata Usaha Negara”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. VI, No. 4, 2018, hlm. 1-13.
- Eka, Shifa, dan Siska, “Dinamika Pencatatan Perkawinan di Indonesia Pasca Permendagri No. 9 Tahun 2016”. *Jurnal MEDIASAS*, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 1-12.
- Fadli Andi Natsif, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia”, *Jurnal Fakultas Hukum UIN Alauddin*, Makassar, 2019, hlm. 1-7.
- Faizal, Liky, “Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan”, *Jurnal Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung*, 2010, hlm. 1-18.
- Hanifah, Mardalena, “Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Soumatra Law Review*, Vol. 2, No. 2, 2019. hlm. 1-12.
- Herman, “Doktrin Tindakan Hukum Administrasi Negara Membuat Keputusan (*Beschikking*)”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2017, hlm. 1-16.
- Herman, “Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2015, hlm. 1-15.
- Jamil, “Perkawinan Bawah Tangan Menurut Hukum Nasional Indonesia”, *Jurnal Al-Daulah*, Vol. 7, No. 1, 2018, hlm. 1-12.
- Karim, Asma, “Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Akta Kelahiran Bagi Anak Sebagai Warga Negara”, *Jurnal Ilmiah Padma Sri Khresna*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm.1-14.
- Kweendy, Chyntia, “Penolakan Pencatatan Perkawinan Oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Akibat Terbitnya Akta Pembatalan

- Perkawinan”, *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, Vol. 7, No. 1, 2021, hlm. 1-14.
- Lucky Dyah Purnama Sari, Afif Khalid, dan Dadin Eka Saputra, “Analisis Yuridis Tentang Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk”, *Jurnal Universitas Islam Kalimantan*, hlm. 6-7.
- Maswandi, “Putusan Verstek Dalam Hukum Acara Perdata”, *Jurnal Mercatoria*, Vol. 10, No. 2, 2017. hlm.1-12.
- Nurdiansyah, Rinal, “Asas dan Norma Hukum Administrasi Negara Dalam Pembuatan Instrumen Pemerintah”, Universitas Brawijaya, Malang, 2011, hlm. 1-15.
- Rachmadi Usman, “Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 3, 2017, hlm.1-10.
- Ramadhani, Wahyu, “Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 12, No. 2, 2017, hlm. 1-10.
- Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat”, *Jurnal Yudisia*, Vol. 7, No. 2, 2016, hlm.1-19.
- Sina, La “Kedudukan Keputusan Tata Usaha Negara Dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 28, No.1, 2020, hlm. 1-12.
- Sita Dewi, Dwi Listyowati, Bertha Elvy Napitupulu, “Data Penduduk dan E-KTP”, *Jurnal Sistem Informasi*, Vol. 5, No. 1, 2018, hlm. 1-11.
- Subekti, Trusto, “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10, No. 3, 2010, hlm. 1-10.
- Tagel, Dewa Putu, “Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil”, *Jurnal Vyahara Duta*, Vol. 14, No. 2, 2019, hlm. 1-13.
- Triadi, “Proses Perkawinan Menurut Hukum Adat di Kepulauan Mentawai di Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 1-13.
- Yati Nurhayati, Irfani, dan M. Yasir Said, “Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum”, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, Vol. 1, No. 2, 2021, hlm. 1-9.
- Zubaidah, Amanda, “Kategori Perkawinan Belum Tercatat Dalam Kategori Blangko Kartu Keluarga Perspektif Yuridis”, *Al – Hukama*, Vol. 9, No. 2, 2019, hlm. 1-15.

Laporan Penelitian, Skripsi, Tesis, Disertasi

Pasaribu, Roxy, Status Kewarganegaraan Akibat Perkawinan Antara WNI dengan WNA Berdasarkan UU RI Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, Universitas Negeri Semarang, *Laporan Skripsi*, 2018.

Media Online

Atom, “Perkawinan”, 8 Februari 2013, <https://smktpi99.blogspot.com/2013> diakses 3 Januari 2024

Tratama Helmi Supanji, “Upaya Pemerintah Mensakralkan Perkawinan di Indonesia”, 27 November 2023, <https://www.kemenkopmk.go.id/upaya-pemerintah-kembali-mensakralkan-perkawinan-di-indonesia> diakses pada 25 Januari 2024.

